

Analisis Mekanisme Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas sebagai Bentuk Akuntabilitas Administrasi Keuangan

Rahima Ayu Zaharani^{1*}, Herry Sutanto²

¹⁻² Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia

email: ayuzaharanirahima@gmail.com¹

Article Info :

Received:
08-06-2026
Revised:
15-06-2026
Accepted:
01-07-2026

Abstract

This study is conducted based on the importance of preparing Official Travel Accountability Reports (SPJ) in accordance with administrative regulations to support accountable financial management. The need for a well-structured accountability system has become increasingly relevant in line with the growing demands for transparency and accountability in regional financial management. The study aims to examine in depth the mechanism for preparing SPJ documents for official travel at the Department of Industry and Trade of West Java Province. This research employs a descriptive qualitative approach with data collection through direct observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the SPJ preparation mechanism is carried out in a structured and systematic manner through document preparation by the activity executor (PPTK), verification by the verifier, examination by the disbursement treasurer, further verification by the budget administration official (PPK-SKPD), and approval by the budget user (PA). Each stage functions as a distinct control point while remaining interconnected within an internal control system that ensures document validity and completeness. The mechanism not only serves an administrative purpose but also functions as an important instrument for maintaining financial accountability in local government. Therefore, the effectiveness of each stage becomes a determining factor in ensuring transparent and accountable financial administration.

Keywords: Administration, Accountability, Mechanism, Official Travel, SPJ.

Akbstrak

Penelitian ini dilakukan atas dasar pentingnya penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas yang sesuai dengan ketentuan administrasi guna mendukung pengelolaan keuangan yang akuntabel. Kebutuhan terhadap sistem pertanggungjawaban yang tertib menjadi semakin relevan seiring meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan guna mengkaji secara mendalam mekanisme penyusunan dokumen SPJ perjalanan dinas di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, serta dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyusunan SPJ berjalan secara bertahap dan sistematis melalui penyusunan dokumen oleh PPTK, verifikasi oleh verifikator, pemeriksaan oleh bendahara pengeluaran, verifikasi lanjutan oleh PPK-SKPD, serta persetujuan oleh Pengguna Anggaran (PA). Setiap tahapan memiliki fungsi kontrol yang berbeda namun saling terintegrasi dalam membentuk sistem pengendalian internal yang memastikan keabsahan dan kelengkapan dokumen. Mekanisme tersebut tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, efektivitas setiap tahapan menjadi faktor penentu dalam mendukung kualitas administrasi keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci: Administrasi, Akuntabilitas, Mekanisme, Perjalanan Dinas, SPJ.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada terwujudnya tata Kelola yang efektif, efisien, transparan, serta akuntabel. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan serta kinerja pemerintah daerah tidak terlepas dari peran transparansi serta akuntabilitas sebagai faktor pendukung utama (Mandasari et al., 2024). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah diatur sebagai suatu rangkaian proses yang terdiri atas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan.

Dengan pelaksanaan yang sistematis pada seluruh tahapan tersebut, efektivitas pengendalian anggaran daerah menjadi sangat bergantung pada konsistensi implementasi prosedur administratif di setiap level birokrasi (Gultom, 2023). Konteks global reformasi sektor publik juga menunjukkan pergeseran paradigma menuju digitalisasi tata kelola keuangan yang menuntut integrasi sistem informasi dan penguatan akuntabilitas berbasis proses (Muslimah et al., 2025). Transformasi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya berfokus pada kepatuhan regulatif, tetapi juga pada peningkatan kualitas proses administrasi yang mampu menghasilkan informasi keuangan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kondisi tersebut, setiap tahapan pengelolaan keuangan dituntut untuk memiliki keterlacakan yang jelas sebagai bagian dari penguatan sistem pengendalian internal.

Dalam konteks pemerintahan daerah, akuntabilitas keuangan tidak hanya diwujudkan melalui penganggaran serta pelaksanaan kegiatan, tetapi juga mencakup penyusunan laporan serta pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya keuangan menggunakan dana daerah. Sistem pengelolaan anggaran yang terintegrasi menjadi kebutuhan utama dalam mendukung efektivitas pelaksanaan berbagai program pemerintahan, termasuk kegiatan perjalanan dinas (Naila & Reviandani, 2025). Penerapan prinsip *good governance* menuntut adanya mekanisme administrasi yang mampu memastikan keterbukaan informasi serta keterlacakan setiap transaksi keuangan secara sistematis dalam seluruh siklus anggaran (Nagoro et al., 2024). Dalam konteks tersebut, kualitas administrasi keuangan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam membangun sistem dokumentasi dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal maupun substantif (Ja'o et al., 2023). Penguatan sistem administrasi ini juga menjadi faktor penting dalam meminimalkan risiko kesalahan pencatatan dan ketidaksesuaian data keuangan antar unit kerja. Selain itu, integrasi prosedur administrasi yang konsisten dapat meningkatkan keandalan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial di lingkungan pemerintah daerah.

Setiap instansi pemerintah daerah berkewajiban menyajikan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan serta pencapaian yang telah diperoleh. Salah satu bentuk penggunaan anggaran daerah yang memerlukan pertanggungjawaban administratif secara ketat adalah kegiatan perjalanan dinas yang memiliki karakteristik mobilitas tinggi dan variasi biaya yang kompleks (Adventy et al., 2024). Perjalanan dinas tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelaksanaan tugas kedinasan, tetapi juga menjadi bagian dari instrumen operasional dalam mendukung efektivitas koordinasi, pengawasan, serta implementasi kebijakan di berbagai wilayah kerja (Khairunnisak & Suryantara, 2025). Dalam pelaksanaannya, regulasi perjalanan dinas menuntut adanya kepatuhan terhadap prosedur administratif yang ketat untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, realisasi, dan pertanggungjawaban anggaran (Fitriansyah & Rahmadani, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa perjalanan dinas memiliki tingkat kompleksitas administratif yang tinggi sehingga membutuhkan sistem pengawasan yang lebih terstruktur. Selain itu, ketidaktepatan dalam pengelolaan administrasi perjalanan dinas dapat berdampak langsung pada kualitas akuntabilitas keuangan daerah secara keseluruhan.

Dalam penyelenggaraan perjalanan dinas, prinsip kehati-hatian menjadi aspek penting yang diwujudkan melalui selektivitas kegiatan, efisiensi penggunaan anggaran, serta orientasi pada pencapaian kinerja yang terukur. Setiap pengeluaran yang timbul dari aktivitas perjalanan dinas harus didukung oleh sistem administrasi yang mampu menjamin validitas dan akurasi data keuangan yang dilaporkan (Ananda & Nafi'ah, 2023). Implementasi sistem pertanggungjawaban berbasis dokumen seperti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) menjadi instrumen utama dalam memastikan bahwa penggunaan anggaran telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat diverifikasi secara administratif (Fitaloka & Nawangsari, 2025). Dalam praktiknya, SPJ tidak hanya berfungsi sebagai laporan formal, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme pengendalian internal yang menjaga integritas proses pengelolaan keuangan daerah (Adisa & Wulandari, 2026). Mekanisme ini berperan penting dalam memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dapat ditelusuri kembali secara sistematis melalui dokumen pendukung yang sah. Selain itu, keberadaan SPJ juga memperkuat fungsi audit internal dalam mendeteksi potensi ketidaksesuaian sejak tahap awal proses administrasi.

Mekanisme penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas pada dasarnya tidak terbatas pada pengumpulan dokumen administratif, tetapi melibatkan tahapan verifikasi, validasi, dan pemeriksaan berlapis yang mencerminkan kompleksitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah, di mana rangkaian tahapan tersebut menunjukkan bahwa proses SPJ merupakan aktivitas administratif yang bersifat sistemik dan setiap dokumen harus melalui proses pengecekan formal

maupun substantif sebelum dinyatakan sah sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan. Setiap tahapan tersebut berperan dalam memastikan kesesuaian antara bukti pengeluaran dengan realisasi kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah (Aziz & Agustina, 2026), sekaligus menuntut konsistensi penerapan standar operasional prosedur agar setiap proses verifikasi dapat berjalan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa SPJ merupakan bagian integral dari sistem akuntabilitas yang tidak dapat dipisahkan dari proses tata kelola keuangan secara keseluruhan (Nisa & Prasetyo, 2025), karena di dalamnya terkandung fungsi kontrol yang memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran memiliki dasar bukti yang sah baik secara administratif maupun substantif serta mendukung keterlacakan informasi keuangan secara sistematis. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan seperti keterlambatan verifikasi, ketidaktertiban dokumen, serta inkonsistensi penerapan prosedur administratif yang dapat memengaruhi efektivitas pelaporan keuangan (Naila & Reviandani, 2025), yang menunjukkan bahwa implementasi SPJ di lapangan belum sepenuhnya selaras dengan desain regulatif yang diharapkan, sehingga berimplikasi pada potensi penurunan kualitas pengendalian internal serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian akuntabilitas keuangan daerah banyak berfokus pada transparansi, sistem pengendalian internal, dan efektivitas pengelolaan anggaran, namun fokus tersebut belum mampu menjelaskan secara mendalam dinamika operasional penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas pada level teknis, khususnya terkait alur verifikasi berjenjang yang kompleks dan melibatkan banyak aktor di lingkungan perangkat daerah. Dalam literatur yang ada, SPJ umumnya dipahami sebagai produk administratif akhir yang menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi, bukan sebagai proses dinamis yang melibatkan interaksi antar aktor birokrasi, mekanisme kontrol internal, dan kepatuhan prosedural yang berjalan secara simultan dalam praktik pengelolaan keuangan daerah. Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan konseptual, di mana akuntabilitas lebih banyak dipahami sebagai output administratif dibandingkan sebagai proses pembentukan yang berlangsung secara bertahap dalam struktur birokrasi. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyusunan SPJ perjalanan dinas sebagai bentuk akuntabilitas administrasi keuangan dengan menitikberatkan pada tahapan administratif, proses verifikasi, serta dinamika implementasi prosedur dalam sistem pengendalian internal. Fokus kajian diarahkan tidak hanya pada aspek teknis penyusunan SPJ, tetapi juga pada interaksi antar tahapan yang membentuk kualitas akuntabilitas dalam praktik birokrasi. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akuntansi sektor publik dengan perspektif berbasis proses serta menjadi rujukan dalam pengembangan sistem pertanggungjawaban keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, dan adaptif terhadap tuntutan tata kelola modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas sebagai bentuk akuntabilitas administrasi keuangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Desain penelitian ini berfokus pada pemahaman proses administratif secara mendalam dalam konteks nyata (natural setting), dengan populasi penelitian mencakup seluruh unit yang terlibat dalam siklus perjalanan dinas dan pertanggungjawaban keuangan. Sampel ditentukan menggunakan purposive sampling yang melibatkan aktor kunci seperti bendahara pengeluaran pembantu, staf verifikasi keuangan, dan pejabat penatausahaan keuangan yang memiliki keterlibatan langsung dalam penyusunan SPJ. Sumber data terdiri dari data primer melalui observasi dan wawancara mendalam, serta data sekunder berupa dokumen SPJ, arsip keuangan, laporan internal, dan literatur pendukung. Fokus operasionalisasi dalam penelitian ini mencakup mekanisme penyusunan SPJ yang diuraikan melalui indikator tahapan administrasi, proses verifikasi, kelengkapan dokumen, serta kepatuhan terhadap standar prosedur, sedangkan akuntabilitas administrasi keuangan dilihat melalui aspek transparansi, keterlacakan, dan kesesuaian terhadap regulasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif terhadap aktivitas penyusunan dan verifikasi SPJ, wawancara semi-terstruktur dengan informan terkait, serta dokumentasi terhadap arsip dan bukti administratif perjalanan dinas. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan yang dilakukan secara berulang selama proses penelitian berlangsung. Untuk menjaga keabsahan data,

penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan informasi hasil wawancara, observasi, dan dokumen administratif agar diperoleh konsistensi temuan. Proses analisis difokuskan pada identifikasi pola mekanisme penyusunan SPJ serta titik-titik kritis dalam alur verifikasi berjenjang yang memengaruhi akuntabilitas administrasi keuangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana praktik penyusunan SPJ perjalanan dinas berkontribusi terhadap pembentukan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penyusunan SPJ sebagai Rangkaian Akuntabilitas Administratif

Mekanisme penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa proses akuntabilitas administrasi keuangan dimulai sejak tahap paling awal pelaksanaan kegiatan, yakni pada level Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bertanggung jawab menyusun dokumen pertanggungjawaban secara sistematis setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Tahap ini tidak hanya dipahami sebagai rutinitas administratif, tetapi merupakan titik awal pembentukan jejak akuntabilitas yang akan menentukan kualitas keseluruhan siklus pertanggungjawaban keuangan daerah. Penyusunan SPJ mencakup pengumpulan berbagai bukti transaksi seperti surat tugas, bukti transportasi, rincian biaya, serta dokumen pendukung lainnya yang harus disusun secara kronologis dan sesuai standar administratif yang berlaku. Ketelitian pada tahap awal ini menjadi krusial karena setiap ketidaksesuaian dokumen berpotensi mengganggu proses verifikasi berlapis pada tahap berikutnya (Adventy et al., 2024).

Tabel 1. Mekanisme Verifikasi Berlapis dalam Penyusunan SPJ Perjalanan Dinas

Tahap Verifikasi	Aktor	Fungsi Utama	Risiko yang Dikendalikan
Verifikasi Awal SPJ	Verifikator	Pemeriksaan kelengkapan dokumen	Ketidaksesuaian administrasi
Pemeriksaan Anggaran	Bendahara Pengeluaran	Kesesuaian dengan DPA	Overbudget dan mismatch belanja
Verifikasi Substantif	PPK-SKPD	Validasi akhir administrasi	Kesalahan legalitas dokumen

Tabel ini menunjukkan bahwa proses verifikasi SPJ perjalanan dinas dilakukan secara berlapis dengan pembagian peran yang jelas antar aktor, mulai dari pemeriksaan awal hingga validasi substantif, sehingga berfungsi menekan risiko kesalahan administrasi serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah. Tahap awal penyusunan SPJ tidak dapat dipandang sebagai aktivitas administratif yang berdiri sendiri, melainkan sebagai fondasi utama dalam membangun rantai akuntabilitas yang diuji secara berjenjang dalam sistem pengendalian internal pemerintah daerah. Kualitas kelengkapan dokumen pada tahap ini berpengaruh langsung terhadap efisiensi proses verifikasi karena keabsahan penggunaan anggaran sangat ditentukan oleh konsistensi bukti pendukung yang tersedia (Fitaloka & Nawangsari, 2025). Kesalahan pada tahap awal berpotensi menimbulkan dampak berantai pada seluruh proses administrasi keuangan berikutnya. Oleh sebab itu, kualitas dokumentasi awal menjadi faktor krusial dalam menjaga efektivitas sistem akuntabilitas birokrasi.

Lebih jauh, keterlibatan PPTK dalam penyusunan SPJ menunjukkan adanya struktur tanggung jawab administratif yang terdistribusi secara jelas dalam organisasi perangkat daerah, di mana setiap aktor memiliki peran spesifik dalam menjaga integritas data keuangan. Mekanisme ini merefleksikan penerapan prinsip segregation of duties yang secara teoritis dirancang untuk meminimalkan risiko kesalahan, manipulasi data, maupun ketidaksesuaian pelaporan dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas. Pembagian peran tersebut juga memperlihatkan bahwa akuntabilitas tidak hanya dibangun melalui mekanisme kontrol eksternal, tetapi juga melalui internalisasi kepatuhan prosedural pada level individu pelaksana kegiatan. Dalam konteks ini, SPJ berfungsi sebagai instrumen awal yang menghubungkan antara aktivitas operasional dengan sistem pelaporan formal dalam tata kelola keuangan daerah (Nisa & Prasetyo, 2025). Selain itu, pola pembagian tugas ini mencerminkan adanya

upaya institusional dalam memperkuat keandalan sistem administrasi keuangan. Efektivitas mekanisme ini sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan prosedur di tingkat operasional.

Selain itu, proses penyusunan SPJ juga mencerminkan adanya hubungan erat antara disiplin administrasi dan kualitas tata kelola keuangan daerah, di mana kelemahan dalam tahap awal sering kali menjadi sumber utama keterlambatan dalam siklus pertanggungjawaban anggaran. Ketidaktepatan dalam pengumpulan dokumen, inkonsistensi data, maupun kurangnya pemahaman terhadap standar administratif dapat menciptakan hambatan sistemik yang berdampak pada seluruh rantai proses verifikasi berikutnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa SPJ bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi juga representasi dari tingkat kepatuhan birokrasi terhadap standar akuntabilitas yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Dalam banyak kasus, kendala administratif pada tahap awal justru memperbesar beban kerja pada tahap verifikasi lanjutan. Hal ini mengindikasikan pentingnya standardisasi dan penguatan kapasitas administrasi pada level pelaksana kegiatan.

Pada tingkat yang lebih konseptual, mekanisme penyusunan SPJ dapat dipahami sebagai bagian dari proses pembentukan akuntabilitas yang bersifat berlapis, di mana setiap tahapan administratif memiliki kontribusi terhadap kualitas akhir pertanggungjawaban keuangan. Dengan demikian, SPJ tidak hanya berfungsi sebagai output pelaporan, tetapi juga sebagai medium yang merefleksikan interaksi antara regulasi, aktor birokrasi, dan praktik administrasi dalam sistem keuangan pemerintah daerah. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa akuntabilitas tidak terbentuk secara instan pada tahap pelaporan akhir, melainkan dibangun secara bertahap sejak proses awal penyusunan dokumen berlangsung. Proses ini juga menunjukkan bahwa akuntabilitas bersifat dinamis dan bergantung pada konsistensi antar tahapan administrasi. Oleh karena itu, SPJ dapat diposisikan sebagai indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola keuangan berbasis proses.

Verifikasi Berlapis dan Pengendalian Internal dalam Siklus SPJ

Proses verifikasi berlapis dalam penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas menunjukkan bahwa akuntabilitas administrasi keuangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat tidak hanya bergantung pada tahap penyusunan awal, tetapi sangat ditentukan oleh efektivitas sistem pengendalian internal yang bekerja secara bertingkat dan terstruktur. Tahap verifikasi oleh verifikator berfungsi sebagai gatekeeping mechanism yang memastikan bahwa setiap dokumen telah memenuhi standar administratif sebelum memasuki proses pemeriksaan lebih lanjut. Pada tahap ini, setiap ketidaksesuaian dokumen akan diidentifikasi dan dikembalikan kepada PPTK untuk dilakukan perbaikan, sehingga menciptakan siklus korektif yang berulang dalam sistem administrasi keuangan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa verifikasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan instrumen pengendalian risiko dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas. Dalam perspektif pengendalian internal, proses ini mencerminkan upaya sistematis untuk menjaga reliability dan integrity data keuangan sebelum diproses lebih lanjut (Jurnalistiati & Maryani, 2025). Selain itu, keberadaan tahapan ini memperkuat posisi verifikator sebagai aktor kunci dalam menjaga kualitas awal akuntabilitas dokumen.

Tabel 2. Ringkasan Struktur Pengendalian Internal dalam Siklus SPJ

Komponen Sistem	Peran Utama	Fokus Pengendalian	Dampak terhadap Akuntabilitas
Verifikator	Pemeriksaan awal dokumen	Kelengkapan administrasi	Mencegah dokumen tidak valid masuk sistem
Bendahara Pengeluaran	Sinkronisasi anggaran	Kesesuaian DPA	Menjaga disiplin anggaran
PPK-SKPD	Verifikasi substantif	Legalitas & kepatuhan	Validasi akhir sebelum otorisasi

Tabel ini menunjukkan bahwa struktur pengendalian internal dalam siklus SPJ dibangun melalui pembagian fungsi yang saling melengkapi, di mana setiap komponen memiliki fokus pengendalian spesifik yang berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas administrasi keuangan dan

efektivitas tata kelola anggaran daerah. Proses verifikasi SPJ tidak berlangsung dalam satu tahap tunggal, melainkan terdiri dari beberapa lapisan pengawasan yang memastikan akurasi dan validitas penggunaan anggaran secara berkelanjutan. Setiap aktor dalam struktur tersebut memiliki peran yang saling melengkapi dalam membentuk sistem kontrol yang komprehensif dan terintegrasi. Struktur berlapis ini memperlihatkan bahwa pengendalian internal dalam SPJ tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dirancang untuk meminimalkan risiko kesalahan dan penyimpangan anggaran secara sistematis. Dalam perspektif akuntabilitas sektor publik, mekanisme ini mencerminkan penerapan prinsip checks and balances dalam pengelolaan keuangan daerah (Nagoro et al., 2024). Efektivitas sistem ini sangat ditentukan oleh konsistensi koordinasi antar aktor pada setiap tahapan verifikasi.

Tahap pemeriksaan oleh bendahara pengeluaran memperkuat fungsi kontrol dengan melakukan sinkronisasi antara dokumen SPJ dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), terutama dalam aspek kesesuaian nilai belanja dan jenis pengeluaran yang direalisasikan. Proses ini berfungsi sebagai mekanisme budgetary control yang memastikan bahwa setiap pengeluaran telah sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidaksesuaian antara SPJ dan DPA pada tahap ini dapat menyebabkan penundaan proses pencairan atau bahkan pengembalian dokumen untuk revisi administratif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bendahara pengeluaran memiliki posisi strategis dalam menjaga disiplin anggaran di tingkat operasional. Dalam praktiknya, tahap ini juga menjadi titik kritis yang menentukan apakah suatu pengeluaran dapat dilanjutkan ke tahap verifikasi substantif atau tidak (Fitriansyah & Rahmadani, 2023). Dengan demikian, fungsi bendahara tidak hanya administratif, tetapi juga bersifat pengendalian keuangan.

Selanjutnya, verifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) memperlihatkan adanya penguatan fungsi pengawasan pada level yang lebih tinggi, di mana dokumen SPJ tidak hanya diperiksa dari sisi kelengkapan administratif, tetapi juga dari aspek substansi dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan daerah. Tahap ini mencerminkan penerapan prinsip prudence dalam pengelolaan keuangan, di mana setiap dokumen harus dipastikan memiliki dasar hukum dan bukti pendukung yang sah sebelum disahkan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, dokumen akan dikembalikan melalui mekanisme korektif yang terstruktur, sehingga menciptakan siklus umpan balik administratif. Proses ini menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak bersifat linier, melainkan bersifat iteratif dan berulang hingga seluruh persyaratan terpenuhi. Dalam kerangka teori organisasi publik, kondisi ini mencerminkan adanya multi-layer accountability system yang memperkuat validitas keputusan administratif (Aziz & Agustina, 2026). Oleh karena itu, PPK-SKPD berperan sebagai penjaga integritas akhir sebelum otorisasi diberikan.

Interaksi antar tahap verifikasi juga menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara efektivitas sistem pengendalian internal dengan kualitas output administrasi keuangan daerah. Ketika salah satu tahapan tidak berjalan optimal, maka akan terjadi bottleneck dalam keseluruhan siklus SPJ yang berdampak pada keterlambatan pencairan anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem verifikasi tidak dapat dipahami secara parsial, tetapi harus dilihat sebagai satu kesatuan sistem yang saling bergantung. Selain itu, proses verifikasi berlapis juga berfungsi sebagai mekanisme pembelajaran organisasi dalam meningkatkan disiplin administrasi keuangan. Dalam jangka panjang, mekanisme ini berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas birokrasi dalam mengelola anggaran secara lebih akurat dan transparan. Oleh karena itu, efektivitas pengendalian internal sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi prosedur di setiap level verifikasi.

Secara konseptual, mekanisme verifikasi berlapis dalam SPJ perjalanan dinas memperlihatkan bahwa akuntabilitas administrasi keuangan tidak hanya dibangun melalui kepatuhan formal terhadap prosedur, tetapi juga melalui interaksi sistematis antar aktor dalam organisasi perangkat daerah. Proses ini menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan hasil dari konstruksi institusional yang terbentuk melalui rangkaian kontrol, koreksi, dan validasi yang terus-menerus. Dalam perspektif process-based accountability, SPJ tidak dapat dipahami hanya sebagai dokumen akhir, tetapi sebagai hasil dari serangkaian proses pengendalian yang kompleks dan saling terkait. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa kualitas akuntabilitas sangat bergantung pada kekuatan sistem verifikasi internal yang diterapkan. Dengan demikian, verifikasi berlapis menjadi elemen kunci dalam membentuk tata kelola keuangan daerah yang transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tahap Pemeriksaan Bendahara Pengeluaran dalam Validasi Kesesuaian Anggaran

Tahap pemeriksaan oleh bendahara pengeluaran dalam proses penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas memiliki peran penting dalam memastikan kesesuaian antara realisasi belanja dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), terutama pada aspek klasifikasi belanja dan batasan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan keuangan daerah. Proses ini tidak hanya berfokus pada pencocokan nilai nominal pengeluaran, tetapi juga mencakup verifikasi substantif terhadap jenis belanja agar sesuai dengan struktur anggaran yang berlaku. Dalam praktiknya, bendahara pengeluaran berfungsi sebagai pengendali internal yang menghubungkan aktivitas operasional perjalanan dinas dengan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. Posisi ini menjadikan tahap pemeriksaan sebagai titik kontrol penting dalam menjaga disiplin fiskal di lingkungan organisasi perangkat daerah. Ketelitian dalam proses ini menjadi faktor utama untuk mencegah terjadinya kesalahan klasifikasi maupun penyimpangan penggunaan anggaran. Selain itu, tahap ini memastikan bahwa setiap pengeluaran memiliki dasar perencanaan yang jelas dan dapat ditelusuri secara administratif.

Lebih lanjut, mekanisme pemeriksaan yang dilakukan bendahara pengeluaran menunjukkan bahwa proses verifikasi SPJ bersifat sistematis dan tidak hanya sebatas pengecekan administratif sederhana. Setiap komponen pengeluaran harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan kegiatan perjalanan dinas yang telah dilaksanakan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara logis maupun administratif. Dalam konteks ini, bendahara pengeluaran tidak hanya bertindak sebagai pencatat transaksi, tetapi juga sebagai penyaring utama yang memastikan seluruh pengeluaran sesuai dengan prinsip kepatuhan, efisiensi, dan akuntabilitas. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, dilakukan proses koreksi yang bersifat umpan balik sebelum dokumen dilanjutkan ke tahap berikutnya. Mekanisme korektif ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal bersifat dinamis dan memungkinkan perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas dokumen keuangan. Dengan demikian, proses ini berperan dalam menjaga konsistensi dan validitas data keuangan daerah.

Tahap pemeriksaan ini juga memperlihatkan bahwa kesesuaian antara SPJ dan DPA menjadi indikator utama dalam menilai tingkat kepatuhan terhadap perencanaan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidaksesuaian sekecil apa pun dapat berdampak pada tertundanya proses pertanggungjawaban yang kemudian memengaruhi kelancaran siklus pencairan anggaran berikutnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran bendahara pengeluaran memiliki dampak yang lebih luas dari sekadar fungsi administratif, karena turut menentukan kelancaran sistem keuangan secara keseluruhan. Dalam perspektif pengendalian internal, tahap ini berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko terhadap kesalahan klasifikasi, ketidaktepatan penggunaan anggaran, maupun potensi penyimpangan prosedural. Oleh karena itu, tahap ini menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas dan kredibilitas sistem pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, konsistensi pelaksanaan pemeriksaan turut memperkuat kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan.

Secara konseptual, peran bendahara pengeluaran dapat dipahami sebagai bagian dari sistem pengendalian internal yang memastikan bahwa setiap pengeluaran memiliki dasar anggaran yang sah, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara formal. Mekanisme ini memperkuat prinsip akuntabilitas karena setiap transaksi tidak hanya dicatat, tetapi juga diuji kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan yang berlaku. Dalam kerangka tata kelola sektor publik, proses ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah yang menuntut ketelitian tinggi pada setiap tahapan administrasi. Selain itu, fungsi ini juga berkontribusi dalam menjaga kualitas informasi keuangan agar tetap dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, tahap pemeriksaan bendahara pengeluaran tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola keuangan yang akuntabel.

Selain itu, keterkaitan tahap pemeriksaan bendahara pengeluaran dengan tahapan sebelumnya menunjukkan adanya kesinambungan dalam siklus penyusunan SPJ yang bersifat berlapis dan saling bergantung. Kesalahan atau ketidaktepatan pada tahap ini dapat berdampak pada proses verifikasi selanjutnya, sehingga memperlambat keseluruhan siklus pertanggungjawaban keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal sangat ditentukan oleh ketelitian dan konsistensi pada setiap titik kontrol dalam proses administrasi keuangan. Dalam konteks ini, bendahara pengeluaran menjadi salah satu elemen kunci yang memengaruhi kualitas akhir dari dokumen SPJ. Oleh karena itu, keberhasilan sistem akuntabilitas keuangan daerah sangat bergantung pada optimalisasi fungsi pada tahap ini.

KESIMPULAN

Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan temuan bahwa mekanisme penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat telah berjalan secara sistematis dan terstruktur melalui beberapa tahapan, yaitu penyusunan dokumen oleh PPTK, verifikasi oleh verifikator, pemeriksaan oleh bendahara pengeluaran, verifikasi lanjutan oleh PPK-SKPD, serta persetujuan oleh Pengguna Anggaran (PA) hingga memastikan bahwa dokumen SPJ telah sesuai dengan ketentuan serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Mekanisme verifikasi berjenjang tersebut menunjukkan adanya sistem pengendalian internal melalui pembagian tugas, verifikasi berlapis, serta pemeriksaan dokumen secara berkelanjutan yang saling terintegrasi dalam satu siklus administrasi keuangan. Setiap tahapan tidak hanya berfungsi sebagai prosedur formal, tetapi juga sebagai instrumen kontrol yang memastikan keabsahan, akurasi, dan konsistensi data keuangan yang dihasilkan dari kegiatan perjalanan dinas. Pola kerja berjenjang ini memperlihatkan bahwa akuntabilitas tidak dibangun secara instan pada tahap akhir, melainkan terbentuk sejak proses awal penyusunan dokumen hingga tahap persetujuan akhir. Selain itu, keterlibatan berbagai aktor dalam setiap tahapan menunjukkan adanya distribusi tanggung jawab yang jelas dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, mekanisme penyusunan SPJ perjalanan dinas tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan aspek administratif, tetapi juga sebagai bagian penting dari sistem pengendalian internal yang mendukung tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kualitas akuntabilitas administrasi keuangan sangat ditentukan oleh efektivitas pelaksanaan mekanisme penyusunan SPJ yang dijalankan secara disiplin, konsisten, dan sesuai dengan standar prosedural yang berlaku. Kekuatan utama dari sistem yang diterapkan terletak pada adanya verifikasi berlapis yang memungkinkan setiap dokumen diuji secara bertahap sebelum dinyatakan sah untuk dipertanggungjawabkan, sehingga potensi kesalahan administratif maupun penyimpangan anggaran dapat diminimalkan. Di sisi lain, mekanisme ini juga menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga bersifat fungsional karena melibatkan interaksi aktif antar aktor dalam setiap proses verifikasi. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa SPJ bukan sekadar output administratif, melainkan bagian dari proses akuntabilitas yang kompleks dan dinamis dalam sistem keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah perlu terus diarahkan pada penguatan koordinasi antar unit, peningkatan kepatuhan prosedural, serta optimalisasi sistem verifikasi agar menghasilkan administrasi keuangan yang lebih efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adventy, M. I. Y., Azhar, A., Putra, R., & Putri, C. A. (2024). Analisis Proses Administrasi Perjalanan Dinas Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *PERSPEKTIF*, 13(2), 392-400. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i2.10941>
- Ananda, AR, & Nafi'ah, BA (2023). Akuntabilitas Penyelenggara Dalam Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Gubernur Di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur. *JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI*, 13 (2), 125–138. <https://doi.org/10.33592/jiia.v13i2.4275>
- Aziz, R. A., & Agustina, F. F. (2026). Analisis Prosedur Pertanggungjawaban SIPD AKLAP dalam Proses Verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. *JURNALIS (Jurnal Akuntansi dan Ilmu Bisnis)*, 6(3), 13-22. <https://journal.aisyahuniversity.ac.id/index.php/JAA/article/view/2227>
- Biswan, A. T., Winarto, T., Imapo, Y. F., Fatimah, A., & Mariana, A. (2025). Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa untuk Akuntabilitas yang Lebih Baik. *Wahana Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 140-149. <https://doi.org/10.56211/wahana.v4i2.1515>
- Fitaloka, R. A. D., & Nawangsari, E. R. (2025). Akuntabilitas Realisasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas Di KPU Provinsi Jawa Timur. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 3710-3721. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.9323>
- Fitriansyah, D., & Rahmadani, I. (2023). Analisis Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban Uang Perjalanan Dinas Di Setdakab Nagan Raya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Terpadu (Jimetera)*, 3(1), 22-26. <https://doi.org/10.35308/jimetera.v3i1.6255>

- Gultom, L. L. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah . (2023). *Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(9), 1-20. <https://doi.org/10.55904/nautical.v2i9.617>.
- Ja'o, M. A., Rengga, A., & Luju, E. (2023). Analisis pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran pada kantor camat Waigete. *Jurnal Projemen UNIPA*, 10(3), 50-60. <https://doi.org/10.59603/projemen.v10i3.76>
- Jurnalistiati, K. D., & Maryani, N. (2025). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 8(1), 1589–1602. <https://doi.org/10.31539/costing.v8i2.15031>
- Khairunnisak, B. I., & Suryantara, A. B. (2025). Prosedur Pengajuan dan Pertanggungjawaban Surat Perjalanan Dinas Pada DPMPTSP Kabupaten Lombok Barat. *Praktik Akuntansi dan Bisnis*, 1(1), 1-6. <https://doi.org/10.29303/prakbis.v1i1.2706>
- Mandasari, Y. E., Darajat, T. A., & Nurhasanah, N. (2024). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022. *Costing: Journal of Economic, Bussines and Accounting*, 7. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.11237>
- Muslimah, S., Ardiansyah, D. E., & Astuti, R. P. (2025). Analisis Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Berdasarkan Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 58-65. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.231>
- Nagoro, P., Purwantini, A. H., & Yuliani, N. L. (2024, August). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. In *UMMagelang Conference Series* (pp. 581-593). <https://doi.org/10.31603/conference.12047>
- Naila, N., & Reviandani, O. (2025). Hambatan Pencairan Anggaran Perjalanan Dinas Pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*, 4(2), 319-325. <http://www.ejournal.stisipimambonjol.ac.id/index.php/SIMBOL/article/view/190>
- Narang, C. E. A. N. (2026). Penguatan Sistem Tatakelola Keuangan dan Pengadministrasian Berkas Keuangan Perjalanan Dinas untuk Meningkatkan Akuntabilitas Birokrasi Publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas. *JDISTIRA-Jurnal Pengabdian Inovasi dan Teknologi Kepada Masyarakat*, 6(1), 264-272. <https://doi.org/10.58794/jdt.v6i1.1846>
- Nisa, M. K., & Prasetyo, A. S. (2025). Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Terhadap Pemrosesan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 5(1), 119-126. <https://doi.org/10.51903/jiab.v5i1.885>
- Pangaribuan, J., & Situmorang, H. H. (2024). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Tranparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Batam. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 1-19. <https://doi.org/10.54367/jrak.v10i1.3519>
- Sarius, DP, Wardi, J., & Pahlawan, R. (2025). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. *AKUNTANOGRAFI: Jurnal Penelitian Akuntansi*, 1 (1), 16-30. <https://doi.org/10.64794/akuntanografi.v1i1.180>
- Suprianto, S., & Riany, M. (2026). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Kegiatan Budaya Kasepuhan Cisitua Lebak Banten. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 15(1), 100-108. <https://doi.org/10.31959/jm.v15i1.3670>
- Talakua, V. A., & Tetelepta, J. M. (2025). Hubungan Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Jawa Barat. *Journal of Applied Accounting*, 4(2), 131-140. <https://doi.org/10.52158/jaa.v4i2.1480>